

CERITA DAMPAK PROGRAM SIAP SIAGA

Dampak Perbaikan Sistem di Pusdalops Penanggulangan Bencana (PB) terhadap Sistem Kesiapsiagaan di NTT

Mei 2023

PROGRAM SIAP SIAGA NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

- Program SIAP SIAGA adalah Kemitraan Australia-Indonesia yang berfokus pada penguatan Manajemen Risiko Bencana di Indonesia dan keterlibatan Indonesia dan Australia pada manajemen bencana di Kawasan Indo-Pasifik.
- **Fokus dalam negeri** pada penguatan kemampuan Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan, menanggapi, dan memulihkan diri dari bencana.
- **Fokus regional** untuk memperkuat kerja sama antara Australia dan Indonesia dalam aksi kemanusiaan di kawasan Indo Pasifik.
- Mendukung **prioritas Pemerintah Indonesia terkait penanggulangan bencana** di bawah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2019-2024) dan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Indonesia 2015-2045.
- Bermitra dengan masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana, sejalan dengan **Pendekatan Pentahelix** Pemerintah Indonesia.
- Program SIAP SIAGA menerapkan **pendekatan perubahan sistem untuk meningkatkan koherensi kebijakan dan kejelasan peran dalam sektor penanggulangan bencana** di Indonesia, berdasarkan hasil luas dari investasi sebelumnya di sektor ini selama 15 tahun terakhir.
- Program SIAP SIAGA bekerja erat dengan, dan memfasilitasi, pemangku kepentingan **untuk memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan yang ada** dan untuk memanfaatkan kegiatan dan program yang sedang berlangsung, jaringan, dan sumber daya, untuk membantu menghubungkan titik-titik di seluruh sistem dengan meningkatkan koordinasi, pembelajaran sejawat, dan kolaborasi.
- Di **NTT**, prioritas Pemerintah Provinsi berfokus pada pengelolaan data dan informasi, operasionalisasi Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana (SPM-SUB), ketangguhan masyarakat, serta kerjasama pemerintah dan non-pemerintah melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).

UJI REALITAS BEKERJA DALAM SISTEM YANG KOMPLEKS

Terlepas dari bantuan dan dukungan teknis untuk Pusdalops NTT yang diberikan sebelumnya, unit ini terus menghadapi tantangan terkait kejelasan peran dan fungsi serta koherensi peraturan. Hal tersebut berdampak pada kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT untuk memenuhi tanggung jawabnya, khususnya terkait kesiapsiagaan dan tanggap bencana. SIAP SIAGA mengkaji isu-isu yang mempengaruhi kinerja Pusdalops dan mengidentifikasi kendala-kendala berikut:

KEJELASAN PERAN



Ketidajelasan peran Pusdalops sebagai bagian dari Posko Tanggap Darurat, dan ketidakjelasan peran aktor lain dalam pemberian informasi kepada Pusdalops sebagai pusat informasi.

KOHERENSI KEBIJAKAN UNTUK KOORDINASI



Ketidakselarasan kebijakan terkait dengan fungsi Pusdalops sebagai pusat koordinasi seluruh BPBD Kabupaten untuk kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

MANAJEMEN DATA



Kelemahan sistem data dan informasi di Pusdalops, berdampak pada kemampuan untuk menyebarkan pesan/peringatan yang akurat kepada pemerintah dan masyarakat untuk peringatan dini, mitigasi, dan respon

MENGHUBUNGKAN INFORMASI YANG ADA

SIAP SIAGA melakukan penilaian menyeluruh untuk mengidentifikasi langkah awal yang penting dalam mendukung kapasitas Pusdalops menjalankan mandatnya, termasuk mengidentifikasi persyaratan untuk peningkatan dan perbaikan fasilitas khusus serta pengembangan sistem manajemen data dan informasi yang terintegrasi. Penilaian tersebut mengungkapkan adanya kesenjangan pengetahuan bagi staf Pusdalops. Rekomendasi diterima dan dilaksanakan oleh BPBD, termasuk alokasi anggaran untuk peningkatan infrastruktur dan biaya operasional.



Memperjelas proses bisnis antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota dalam hal manajemen data kebencanaan.



Peningkatan kualitas dokumentasi lapangan (foto, video, laporan), pemutakhiran dan perbaikan pengelolaan website, serta penguatan proses pelaporan ke pejabat yang lebih tinggi.



Memperjelas mekanisme umpan balik publik.

PERBAIKAN SISTEM

Upaya Pusdalops untuk mengembangkan dan menerapkan sistem informasi internal untuk bencana imenghasilkan kejelasan peran yang lebih baik untuk keperluan komunikasi, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan, peringatan dini, dan tanggap bencana. Proses pendataan dan pelaporan Pusdalops disesuaikan dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Bencana, sedangkan mekanisme penyimpanan dan penyajian data (dashboard) ditingkatkan dan diintegrasikan ke dalam website BPBD (bpbdd.nttprov.go.id). Sistem ini kemudian digulirkan ke kabupaten/kota, seperti Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Manggarai Barat.



PERUBAHAN INTERNAL: Pusdalops meningkatkan perannya untuk membantu unit-unit lain di BPBD untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi mereka, sekaligus memosisikan diri secara strategis dalam **sektor penanggulangan bencana** di tingkat provinsi. BPBD telah secara proaktif melobi Gubernur dan anggota kunci Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi untuk lebih memperhatikan prioritas PB dan meningkatkan koherensi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.



PERUBAHAN EKSTERNAL: Perbaikan terus-menerus terhadap efektivitas sistem pengelolaan data dan informasi berdampak positif pada **cara kerja Pusdalops dengan aktor lain**, termasuk melalui koherensi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diperbarui/baru dan pengembangan proses bisnis untuk koordinasi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan tanggap darurat.

FAKTOR PENDORONG UNTUK PERUBAHAN

01

COVID-19

Kebutuhan yang mendesak untuk memberikan informasi tentang langkah-langkah dalam mengurangi dampak COVID-19, termasuk lokasi fasilitas umum seperti tempat cuci tangan dan materi tanggapan COVID-19 meningkatkan tekanan pada Pusdalops dalam memenuhi tanggung jawab mereka untuk penyebaran dan pengelolaan informasi publik.

02

CUACA EKSTRIM

Data yang akurat dan tepat waktu mengenai lokasi yang terkena dampak pasca Topan Seroja, termasuk jumlah orang yang terkena dampak dan kegiatan tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sangat penting.

03

PENGARUH PEMANGKU KEPENTINGAN

Peran FPRB baik sebagai mitra strategis BPBD yang mewakili kepentingan masyarakat sipil, media, dan civitas akademika memberikan dorongan positif bagi BPBD untuk memberikan informasi yang andal, tepat waktu, dan akurat kepada masyarakat terkait mitigasi dan tanggap bencana.

04

PENDEKATAN FASILITASI SIAP SIAGA

Program SIAP SIAGA bekerja sama dengan BPBD untuk melakukan pemetaan kapasitas dan penilaian kebutuhan yang komprehensif, termasuk sumber daya manusia, kejelasan dan koherensi proses bisnis, serta infrastruktur untuk sistem informasi. Untuk mendukung perubahan dalam sistem kesiapsiagaan Program SIAP SIAGA telah memfasilitasi pelatihan tentang isu-isu tematik seperti administrasi website, penulisan peringatan, GIS, pemetaan infografis, pelaporan harian, dan keterampilan komunikasi untuk staf BPBD.



DAMPAK PENINGKATAN KEJELASAN PERAN



Kesadaran Pusdalops akan **peran dan tanggung jawab mereka meningkat secara signifikan**. Ini termasuk peran strategis mereka dalam kebijakan pemerintah daerah, khususnya terkait kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat yang terkoordinasi. Selain itu, penguatan peran Pusdalops telah mendukung BPBD Provinsi untuk berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, seperti BPBD kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya di Provinsi NTT.

Dalam jangka panjang, perubahan ini harus mengarah pada peningkatan prioritas penanggulangan bencana dalam agenda pembangunan Provinsi NTT termasuk peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung kerja BPBD.

DAMPAK PENINGKATAN KOORDINASI



Dengan Pusdalops yang aktif, BPBD mampu memperkuat koordinasi dan meningkatkan koordinasi dengan sektor dan pemangku kepentingan lainnya. Misalnya, pada Desember 2022, titik rendah tropis mendekati Kawasan NTT dan menyebabkan hujan ekstrem yang memicu banjir di beberapa daerah.

Berdasarkan Rencana Kontinjensi Cuaca Ekstrem, BPBD Provinsi NTT – melalui Pusdalops – mengaktifkan SOP serta melakukan beberapa rapat koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, memastikan bahwa semua lembaga menyadari peran dan tanggung jawab mereka, memaksimalkan jaringan sosialisasi peringatan dini, serta memperbarui sumber daya tanggap darurat dan proses mobilisasi.

KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DAN DAMPAK BERJENJANG

Sebagai hasil dari peningkatan yang signifikan dalam manajemen data, Pusdalops BPBD Provinsi NTT lebih mampu mendukung semua kabupaten di Provinsi NTT untuk mengelola data bencana mereka dan memastikan bahwa sistem integrasi data dari tingkat kabupaten hingga provinsi berjalan efektif. Ada beberapa indikator awal dari dampak tersebut:

Persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran (2022, 2023) untuk biaya operasional Pusdalops dan perluasan sistem data dan informasi ke 10 kabupaten tambahan.

Rapat koordinasi (Rakor) Pusdalops menghasilkan kejelasan alokasi anggaran tanggap bencana dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pertanian.

Badan Keuangan Daerah mengembangkan Peraturan Gubernur tentang penggunaan Dana Darurat, yang memungkinkan BPBD menggunakan dana tersebut untuk kegiatan kesiapsiagaan, termasuk fungsi koordinasi Pusdalops.

Dukungan dari Dinas Informasi dan Komunikasi untuk internet berkecepatan tinggi di Pusdalops.

Alokasi anggaran komputer baru BPBD Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan spesifikasi rekomendasi Program SIAP SIAGA.

Kabupaten Kupang dan Rote Ndao telah meningkatkan standarisasi data, pemasukan data dan penyimpanan buku catatan melalui peluncuran sistem provinsi.

Pusdalops Kota Kupang melakukan investasi untuk peningkatan fasilitas dan mengembangkan pelaporan kejadian bencana secara sistematis.



Langkah nyata berikutnya adalah terus mendukung Pusdalops BPBD Provinsi NTT untuk menjalankan fungsi utamanya dan mendorong kolaborasi dengan pemangku kepentingan utama di dalam dan di luar pemerintah (yaitu: lembaga pemerintah lainnya dan FPRB). Kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya sudah terlihat melalui upaya kolektif untuk membangun Sistem Informasi Kebencanaan yang akan diintegrasikan ke dalam Satu Data Provinsi. Kolaborasi dengan FPRB dilakukan melalui pelibatan mahasiswa jurusan Ilmu Teknologi (IT) sebagai tenaga magang di Pusdalops (dibimbing oleh konsultan Manajemen Data dan Informasi (DIM) Program SIAP SIAGA) untuk membantu peningkatan efektivitas DIM. Untuk tujuan manajemen pengetahuan, perlu dan penting untuk mendokumentasikan pembelajaran tentang perubahan sistematis dan substantif di Pusdalops dan menyebarkannya ke seluruh Indonesia.

Silvia Fanggidae, Koordinator Program SIAP SIAGA Provinsi NTT



SEBELUM

Kelemahan kapasitas di Pusdalops untuk penyediaan informasi yang akurat di semua tahapan penanggulangan bencana.

Masyarakat setempat tidak mendapatkan informasi mengenai peringatan dini dan mitigasi bencana.

Pusdalops didorong untuk menjalankan perannya sebagai *platform* koordinasi di dalam BPBD dan dalam menyediakan data untuk unit lain, melemahkan kapasitas BPBD untuk memimpin koordinasi tanggap bencana.

PERAN SIAP SIAGA



**PENILAIAN
SISTEM**



FASILITASI



**PENDUKUNG
PEMBELAJARAN**



**BANTUAN TEKNIS
STRATEGIS**

SESUDAH

Pusdalops beroperasi tanpa henti dan memberikan informasi yang akurat di semua tahapan penanggulangan bencana. Informasi dari Pusdalops kini tersedia secara tepat waktu dan dijadikan referensi oleh media lokal.

Masyarakat lokal menerima informasi yang akurat tentang kejadian bencana dengan langkah-langkah yang jelas untuk mengurangi dampak bencana.

Pusdalops mampu menjalankan perannya sebagai penghubung informasi bagi unit lain di lingkungan BPBD. Pengelolaan data yang efektif di dalam BPBD telah memperkuat peran dan legitimasinya untuk memimpin upaya terkoordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya dalam kesiapsiagaan, pencegahan, dan tanggap bencana.



TERIMA KASIH